

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem otonomi daerah di Indonesia yang mulai berlaku pada masa orde baru menuntut daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba bersaing untuk menjadi daerah yang terbaik di antara daerah-daerah lain. Karena ini menjadi peluang besar untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka setiap daerah dituntut untuk mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya agar dapat memaksimalkan potensinya guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Otonomi yang berjalan di Indonesia saat ini tidak hanya bagi daerah yang memiliki otonomi daerah, tetapi desa juga memiliki otonomi desa di mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Kebijakan ini pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu Undang-undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah terdorong untuk mengeluarkan undang-undang tentang Desa.

Jika dibandingkan dengan kelurahan, desa sering kali dianggap sebagai tempat yang rendah meskipun keduanya memiliki tingkat pemerintahan yang sama, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya. Hal tersebut tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah ingin mengubah pemikiran ini hingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan bahwa desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang terdapat peraturan yang menyatakan bahwa desa di setiap tahunnya akan mendapatkan bantuan dari APBN sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar rupiah yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4), akan tetapi desa tidak bisa sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan, bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus menguras tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan Pendapatan Desa yang maksimal. Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk ke dalam kas desa.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa harus dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

Bahkan Eko Putro Sandjojo sendiri sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam tempo.co (Rabu, 7 Juni 2017 pukul 10:08 WIB. Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/882205/mendes-pdtt-dorong-bumdes-jadi-sumber-utama-pembangunan-desa.html>, diakses pada Selasa, 13 Maret 2018 pukul 15:45 WIB) mengungkapkan bahwa Mendes PDTT mendorong kemajuan dari BUMDes agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desanya, terutama dalam bidang pembangunan desa. Beliau pun mengatakan bahwa pemberian dan pengalokasian dana desa hanyalah sebagai stimulus agar pemerintah desa dapat menggunakan dan memutar dana tersebut menjadi jumlah yang lebih besar untuk kepentingan pembangunan desa, yang caranya yaitu tidak lain adalah dengan mendirikan dan mengelola BUMDes.

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengelola aset dibidangnya. Jika BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik

daerah yang mengelola aset-aset yang ada di daerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di Desa Lumbungsari juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya ke arah perekonomian desa.

Desa Lumbungsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Desa Lumbungsari memiliki luas wilayah berjumlah 483 Ha, di mana sepertiga kawasannya merupakan kawasan persawahan yang berjumlah 169 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Lumbungsari adalah buruh tani dan petani yang juga sebagai pemilik lahan pesawahan.

Berdasarkan Peraturan Desa Lumbungsari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), BUMDes di Desa Lumbungsari bernama “Harapan Jaya”. Sosialisasi mengenai program BUMDes Harapan Jaya Desa Lumbungsari dilakukan oleh pemerintah desa maupun pihak BUMDes yaitu dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh pengawas, para pengurus, anggota, dan tokoh masyarakat.

Pada awal pembentukan, BUMDes Harapan Jaya menempati bangunan yang statusnya bukan milik sendiri dan BUMDes ini memiliki 4 (empat) program utama kegiatan yang dijalankan diantaranya Unit Saprotan/ penyedia pupuk, Unit Waserda, Unit Laku Pandai, dan Unit Bank Sampah. Selama beberapa bulan dijalankan program-program tersebut bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik,

namun salah satu diantaranya yaitu Unit Bank Sampah selalu mengalami hambatan dan kendala sehingga tidak dapat berjalan dengan baik, dan pada akhirnya BUMDes Harapan Jaya memutuskan untuk berhenti menjalankan Unit Bank Sampah ini.

Berdasarkan pengamatan awal, peneliti melihat pelaksanaan program BUMDes Harapan Jaya sudah berjalan dengan cukup baik, namun di samping itu masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya.

Selama pelaksanaan dalam masing-masing program unit usaha, memiliki hambatan-hambatan dan halangan tersendiri. Seperti misalnya, *Unit Saprotan* atau “Sarana Produksi Pertanian”, menjalankan kegiatan yang bergerak dalam bidang penyediaan sarana produksi pertanian terutama pupuk untuk memenuhi kebutuhan para petani khususnya di sekitar wilayah Desa Lumbungsari. Lokasi kegiatan Unit Saprotan ini bertempat di Dusun Cileungsing yang berjarak sekitar satu kilometer dari kantor sekretariat BUMDes Harapan Jaya. Hal ini menjadi kendala dan alasan bagi sebagian masyarakat Desa Lumbungsari mengapa mereka tidak membeli pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya di Unit Saprotan BUMDes ini. Masyarakat lebih memilih untuk membeli pupuk di warung atau kios-kios yang juga menjual pupuk yang terdapat di dusunnya masing-masing.

Selain Unit Saprotan, BUMDes Harapan Jaya juga menjalankan Unit Waserda. *Unit Waserda* atau “warung serba ada” ini bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan sembako.

Lokasi operasional, dalam unit ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya, di mana lokasinya berada di Dusun Dayeuhdatar, yang juga berjarak sekitar satu kilometer dari Balai Desa atau pusat sekretariat BUMDes.

BUMDes Harapan Jaya juga memiliki Unit Laku Pandai. *Unit Laku Pandai* adalah salah satu unit usaha BUMDes Harapan Jaya yang menjalankan kegiatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan Alat Tulis Kantor, jasa foto kopi, dan yang baru direalisasikan adalah jasa keuangan, di mana memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan berbagai macam transaksi keuangan, seperti men-*transfer* uang, pembayaran listrik PLN, membeli tiket kereta api, tiket pesawat, dan sebagainya.

Apabila dilihat dari pemaparan di atas, masalah utama dari pelaksanaan program-program unit usaha BUMDes Harapan Jaya adalah jarak yang cukup jauh dari satu lokasi operasional ke lokasi operasional lain. Lokasi kegiatan yang tidak terpusat membuat masyarakat menjadi *acuh tak acuh* untuk ikut berpartisipasi dalam jalannya program-program tersebut. Terlebih selama ini, kantor sekretariat BUMDes Harapan Jaya hanya menempati bangunan yang statusnya adalah pinjaman. Namun, pada tahun 2018 ini BUMDes Harapan Jaya tengah membangun sebuah bangunan yang akan menjadi lokasi pemusatan kegiatan yaitu sebagai kantor sekretariat serta untuk menjalankan program-program unit usaha yang sedang berjalan.

Di samping permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program-program unit usaha, pendirian BUMDes di Desa Lumbungsari ini juga boleh dikatakan terlambat karena jika meninjau kembali anjuran pemerintah untuk

mendirikan BUMDes yang pertama itu adalah pada tahun 2004, tepatnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213. Sedangkan BUMDes Harapan Jaya sendiri dibentuk pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Lumbungsari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan baru aktif beroperasi satu tahun setelah dibentuknya BUMDes tersebut.

Setelah BUMDes di Desa Lumbungsari ini dibentuk, masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam berjalannya BUMDes Harapan Jaya. Bahkan bukan tidak mungkin, masyarakat belum mengetahui keberadaan BUMDes di Desa Lumbungsari itu sendiri. Padahal jika masyarakat mengetahui tujuan dari pendirian BUMDes bisa sangat membantu dan menguntungkan, sebagaimana tercantum dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2.

Selain itu, mayoritas masyarakat desa yang merupakan masyarakat tradisional yang cenderung masih awam tentang ekonomi dan usaha. Hal ini tentu saja harus diubah seiring dengan perkembangan zaman. Perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat bisa berpartisipasi dan berkontribusi dengan baik dalam program-program BUMDes. Kurang partisipatifnya masyarakat bisa juga dikarenakan dalam mendirikan BUMDes sendiri dengan cara *top-down* yang mana BUMDes ini dibentuk dikarenakan adanya inisiatif dari Pemerintah Desa Lumbungsari untuk menghimpun suatu wadah untuk menampung program-program pemerintah yang bersifat pemberdayaan masyarakat, bukan murni inisiatif dari masyarakat sendiri. Karena jika BUMDes ini didirikan berdasarkan

kemauan masyarakat dan didukung dengan pemerintah desa maka pemerintah desa bisa dengan mudah menjalankan BUMDes ini karena partisipasi dari masyarakat tentulah akan tinggi dan ini berbeda jika BUMDes ini dibentuk atas dasar kemauan sekelompok kecil saja atau pemerintah desa.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting untuk kemajuan BUMDes ini, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akselerasi permodalan. Namun, berdasarkan dengan wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ketua (direksi) BUMDes Harapan Jaya, Ajid Sajidin, yang peneliti temui di kediamannya, nyatanya peran pemerintah daerah masih belum dirasakan bagi berjalannya BUMDes Harapan Jaya di Desa Lumbungsari.

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Lumbungsari Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari sebagai berikut:

1. Terlambatnya Pembentukan BUMDes di Desa Lumbungsari.
2. Peran pemerintah daerah baik kabupaten atau provinsi masih kurang dalam mendukung pelaksanaan BUMDes di Desa Lumbungsari.
3. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Lumbungsari.
4. Keberadaan BUMDes di Desa Lumbungsari memiliki pengaruh yang kurang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

E. Kegunaan Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoretis dan secara praktis, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis yaitu melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BUMDes Harapan Jaya Desa Lumbungsari

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan serta pegawai BUMDes Harapan Jaya di Desa Lumbungsari dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

b. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat mengenai Implementasi BUMDes di Desa Lumbungsari.

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mahasiswa program studi Administrasi Publik.

Demikian kegunaan penelitian ini disusun, semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk memudahkan dalam penelitian. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Landasan Hukum BUMDes

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

2. Implementasi Kebijakan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, Donald S. van Metter dan Carl E. van Horn (dalam Agustino, 2016: 133) merumuskan suatu model pendekatan yang dikenal dengan *A Model of the Policy Implementation*. Terdapat enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut antara lain:

a. Ukuran dan tujuan;

Ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan ukuran dan tujuan kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi-interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi

pada sulitnya implementasi kebijakan.

b. Sumber daya;

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik agen pelaksana;

Adapun yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

d. Sikap atau kecenderungan para pelaksana;

Kecenderungan implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- 2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan
- 3) Intensitas kecenderungan implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana;

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya: ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

3. Permasalahan
 - a. Terlambatnya Pembentukan BUMDes di Desa Lumbungsari.
 - b. Peran pemerintah daerah baik kabupaten atau provinsi masih kurang dalam mendukung pelaksanaan BUMDes di Desa Lumbungsari.
 - c. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Lumbungsari.
 - d. Keberadaan BUMDes di Desa Lumbungsari memiliki pengaruh yang kurang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mempermudah dalam penelitian, peneliti menggambarkan skema kerangka pemikiran penelitian pada halaman selanjutnya:

Gambar

Kerangka Pemikiran Penelitian

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



Implementasi kebijakan menurut Van Metter & Van Horn:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Karakteristik agen pelaksana;
4. Sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana;
5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana; dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Sumber: Agustino (2016: 133)



Implementasi BUMDes di Desa Lumbungsari
Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti), 2018.

G. Proposisi

Berdasarkan observasi pra-penelitian, peneliti melihat bahwa Desa Lumbungsari ataupun khususnya BUMDes di Desa Lumbungsari Kec. Lumbung Kab. Ciamis yang bernama BUMDes Harapan Jaya, mengalami perkembangan setiap tahunnya meskipun dalam prosentase yang tidak banyak. Pada tahun 2018 ini BUMDes Harapan Jaya tengah membangun sebuah gedung, setelah selama dua tahun sebelumnya menempati bangunan yang status kepemilikannya adalah pinjaman.

Dalam setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pasti tidak dapat terhindar dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, begitu pula halnya dengan pelaksanaan program BUMDes di Desa Lumbungsari ini. Dalam implementasi BUMDes di Desa Lumbungsari Kec. Lumbung Kab. Ciamis masih memiliki beberapa permasalahan dan mengalami berbagai hambatan dengan memperhatikan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi), hubungan antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Peneliti memberikan asumsi bahwa implementasi BUMDes di Desa Lumbungsari Kec. Lumbung Kab. Ciamis sudah berjalan dan berkembang sedikit demi sedikit, meski belum mencapai titik maksimal dalam pelaksanaannya.